



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab III metode penelitian, secara garis besar terdapat Obyek Penelitian, Desain Penelitian, Definisi Operasional dan Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data, beserta Teknik Analisis Data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di kota Jakarta Utara. Data yang digunakan dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang akan disebarakan secara acak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di Jakarta Utara.

A. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang akan menjadi fokus penelitian penulis adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan yang berada di kota Jakarta Utara, Indonesia. Data yang akan diteliti merupakan hasil data dari pengisian Kuesioner seorang Wajib Pajak pada tahun 2021. Dimana penelitian ini akan menguji pengaruh Persepsi Wajib Pajak mengenai Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

B. Desain Penelitian

Dalam suatu Metode Penelitian Bisnis, menurut Cooper dan Schindler (2014) penelitian ini dapat ditinjau dari perspektif sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Tingkat Perumusan Masalah

Berdasarkan tingkat perumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini adalah termasuk penelitian formal, dimana penelitian formal yang dimaksud ini adalah mempunyai tujuan untuk menguji sebuah hipotesis dan juga untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terdapat di dalam batasan masalah, yaitu variabel – variabel yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di Jakarta Utara.

2. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey, yaitu melakukan pengumpulan sebuah informasi dengan cara menyebarkan kuesioner kepada subjek penelitian, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Usahawan.

3. Kontrol Peneliti Terhadap Sebuah Variabel

Penelitian ini menggunakan desain *ex post facto*, yang berarti dimana variabel penelitian telah terjadi dan peneliti tidak memanipulasinya, sehingga peneliti tidak memiliki kontrol terhadap variabel – variabel yang akan diteliti dan peneliti hanya melaporkan apa yang sedang dan sebenarnya terjadi.

4. Tinjauan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan studi deskriptif, penelitian deskriptif yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan berbagai data, serta menguraikan dan permasalahan yang dianalisis. Tujuan dari penelitian ini untuk:

- Untuk menganalisis pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang dan Perizinan (Institusi) dan Perizinan (Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak *Tax Evasion*.
- c. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak *Tax Evasion*.

5. Dimensi Waktu

Penelitian ini menggunakan dimensi lintas bagian (*cross section*) dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sebuah data yang akan diteliti dalam meneliti sebuah fenomena tertentu yang hanya dilakukan dalam satu kali periode. Peneliti membagikan kuesioner dari bulan Maret 2021 – April 2021.

6. Ruang Lingkup Topik Bahasan

Penelitian ini menggunakan studi statistik, dengan cara memperoleh atau mendapatkan karakteristik dari sebuah populasi dan akan ditarik kesimpulan dari karakteristik sampel, dimana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Jakarta Utara, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Usahawan.

7. Lingkungan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil sesuai fakta di lapangan tanpa adanya manipulasi, dengan cara peneliti membagikan kuesioner kepada responden yang akan diteliti.

8. Persepsi Subjek

Hasil kesimpulan dari penelitian ini bergantung pada jawaban yang akan diberikan oleh subjek peneliti. Dimana persepsi yang baik adalah persepsi yang nyata dan tidak adanya penyimpangan dari situasi sehari – hari.



C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel-Variabel yang akan digunakan didalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen (Variabel Terikat) merupakan suatu variabel yang tidak bebas, dan juga terikat dan variabel ini dipengaruhi oleh setiap variabel bebas atau biasanya disebut dengan variabel independen (Puranti, Zamzam, & Romli, 2020).

1.1 Penggelapan Pajak

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yang pada intinya penggelapan pajak merupakan suatu hal yang ilegal dan dapat menimbulkan kerugian negara, kerugian negara yang dapat ditimbulkan salah satunya adalah berkurangnya setoran dan pajak kedalam kas negara atau bahkan tidak adanya dana pajak yang masuk kedalam kas negara (Wahyuni, 2011). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu.
2. Tidak memenuhi laporan penghasilan serta pengurangannya secara jelas dan lengkap.
3. Tidak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu.
4. Tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyeteror pajak penghasilan, baik itu dipotong ataupun dipungut.
5. Tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran pajaknya yang terhutang.
6. Tidak memenuhi permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.
7. Melakukan penyuaipan terhadap aparat pajak dan tindakan intimidasi lainnya.

Hakipta milik IBIKIS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Hakipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKIS.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKIS.



Dalam melakukan pengukuran setiap indikator pada penelitian ini menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai dengan 5, dengan perincian sebagai berikut :

1. Angka 1 : Sangat Tidak Setuju
2. Angka 2 : Tidak Setuju
3. Angka 3 : Netral
4. Angka 4 : Setuju
5. Angka 5 : Sangat Setuju

Tabel 3.1

Definisi Operasional Penggelapan Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Penggelapan Pajak (Y)	Pengelakkan dan pengabaian pembayaran pajak yang terhutang. Sumber: (Zain, 2005:51)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu. 2. Tidak memenuhi laporan penghasilan serta pengurangannya secara jelas dan lengkap. 3. Tidak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu. 4. Tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyeter pajak penghasilan, baik itu dipotong ataupun dipungut. 5. Tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran pajaknya yang terhutang. 6. Tidak memenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah dengan tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu. 2. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi laporan penghasilan dengan pengurangannya secara jelas dan lengkap. 3. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu. 4. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyeter pajak penghasilan, baik itu dipotong ataupun dipungut. 5. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.</p> <p>7. Melakukan penyuaian terhadap aparat pajak dan tindakan intimidasi lainnya. Sumber: (Zain, 2005:51)</p>	<p>pajaknya yang terhutang.</p> <p>6. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah tidak memenuhi permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.</p> <p>7. Salah satu terjadinya upaya penggelapan pajak adalah dengan melakukan penyuaian terhadap aparat pajak maupun pihak ketiga.</p>
---	--	---	--

2. Variabel Independen

Variabel Independen (Variabel Bebas) merupakan variabel yang terjadi akibat perubahan dan menimbulkan variabel dependen atau variabel terikat (Puranti, Zamzam, & Romli, 2020).

2.1 Keadilan

Keadilan merupakan mendapatkan keadilan yang sama, dengan tidak membedakan terhadap siapa dan terhadap apa. Keadilan dalam perpajakan dimana masyarakat atau yang dimaksud Wajib Pajak hendak berpartisipasi dalam rangka pembiayaan pemerintah secara proporsional dan sesuai dengan kemampuannya masing – masing dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang telah dinikmati dari negara (Zain, 2005:25).

Dalam melakukan pengukuran setiap indikator pada penelitian ini menggunakan skala

Likert dengan skala 1 sampai dengan 5, dengan perincian sebagai berikut :

1. Angka 1 : Sangat Tidak Setuju
2. Angka 2 : Tidak Setuju
3. Angka 3 : Netral



- 4. Angka 4 : Setuju
- 5. Angka 5 : Sangat Setuju

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan satu masalah
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 3.2

Definisi Operasional Keadilan Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
C. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal Sumber: (Waluyo & Irawan, 2000)	1. Keadilan Horizontal. 2. Keadilan Vertikal. Sumber: (Waluyo & Irawan, 2000)	1. Dikatakan adil apabila Wajib Pajak membayar pajak dengan memperoleh penghasilan yang sama. 2. Wajib Pajak membayar pajak lebih besar apabila penghasilan yang diperoleh lebih besar pula. Sumber: (Waluyo & Irawan, 2000)	1. Saya telah membayar pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diperoleh. 2. Pajak yang dibayarkan tidak memberatkan karena telah sesuai dengan besarnya penghasilan yang diperoleh 3. Pemerintah secara adil memberikan beban pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan dalam membayar pajak. 4. Beban pajak yang diberikan Pemerintah memberatkan masyarakat maupun Wajib Pajak karena telah sesuai dengan kemampuan dalam membayar pajak. 5. Saya merasakan secara langsung kontribusi serta manfaat dari jasa pemerintah berupa sarana didalam kehidupan saya. 6. Kontribusi dan manfaat dari jasa pemerintah telah diberikan secara adil dan merata. 7. Sarana yang diberikan pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan dengan *Self Assesment System* mewajibkan para Wajib Pajak untuk menentukan serta melapor sendiri besarnya pajak yang terhutang. Sistem Perpajakan dengan *Self Assesment System* juga tidak melibatkan campur tangan dari Fiskus dan hanya bertugas untuk mengawasi. Dimana Wajib Pajak diharuskan secara aktif dalam menghitung, menyeteror



dan serta melaporkan besarnya pajak yang terhutang. Namun Wajib Pajak juga dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan penyelundupan pajak (Zain, 2005:110).

Dalam melakukan pengukuran setiap indikator pada penelitian ini menggunakan skala

Likert dengan Skala 1 sampai dengan Skala 5, adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Angka 1 : Sangat Tidak Setuju
2. Angka 2 : Tidak Setuju
3. Angka 3 : Netral
4. Angka 4 : Setuju
5. Angka 5 : Sangat Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 3.3

Definisi Operasional Sistem Perpajakan

Variabel Sistem Perpajakan (X2)	Dimensi	Indikator	Pernyataan
	<p><i>Self Assesment System.</i></p> <p>Sumber: (Waluyo & Irawan, 2000)</p>	<p>1. Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang</p> <p>2. Fiskus atau petugas pajak tidak ikut campur tangan dan hanya bertugas untuk mengawasi</p> <p>3. Wajib Pajak diwajibkan untuk aktif dimulai dari menghitung, menyetor, dan juga melaporkan sendiri pajaknya.</p> <p>Sumber: (Waluyo & Irawan, 2000)</p>	<p>1. Saya sebagai Wajib Pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.</p> <p>2. Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui besanya pajak yang terhutang dan kapan harus membayarnya</p> <p>3. Saya sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutang karena tidak adanya campur tangan fiskus (petugas pajak).</p> <p>4. Saya sebagai Wajib Pajak harus secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.</p>

2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan dibuat agar dipatuhi dan juga ditaati. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat memotivasi para Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, terkadang sanksi perpajakan tidak membuat jera, seperti masih banyaknya penunggakan dalam melaporkan besarnya pajak yang terhutang (Erline, Ratnawati, & Andreas, 2018).

Dalam melakukan pengukuran setiap indikator pada penelitian ini menggunakan skala Likert dengan Skala 1 sampai dengan Skala 5, adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Angka 1 : Sangat Tidak Setuju



2. Angka 2 : Tidak Setuju
3. Angka 3 : Netral
4. Angka 4 : Setuju
5. Angka 5 : Sangat Setuju

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan sudah ada dan sejenisnya
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 3.4

Definisi Operasional Sanksi Perpajakan

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Sanksi Perpajakan (X3)	<p>A. Sanksi Pidana Sumber</p> <p>B.Sanksi Administratif. (Resmi, 2003:65-66)</p>	<p>1. Denda Pidana</p> <p>2. Pidana Kurungan</p> <p>3. Pidana Penjara</p> <p>Sumber: (Resmi, 2003:65-66)</p>	<p>1. Wajib Pajak yang telah melakukan tindak pidana seperti tindak kejahatan dan melanggar norma akan dikenakan sanksi berupa denda pidana.</p> <p>2. Wajib Pajak atau Pihak Ketiga (Petugas Pajak) yang telah melakukan pelanggaran dikenakan ancaman berupa pidana kurungan apabila tidak sanggup memenuhi denda pidana.</p> <p>3. Wajib Pajak atau para pejabat yang telah melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara.</p> <p>4. Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar Rp. 100,000,. apabila terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke kantor pajak dan dikenakan denda administratif sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar karena melakukan pemeriksaan tanpa melakukan penyelidikan.</p>



D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil sampel Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di Kota Jakarta Utara. Peneliti akan mengambil sampel sebanyak 30 responden untuk di uji kualitas data atau dengan kata lain adalah uji validitas, dan uji reliabilitas untuk kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan untuk data primer dengan menggunakan metode survei yang didalamnya terdapat sekumpulan pertanyaan untuk memperoleh opini responden yang berkaitan dengan sebuah materi penelitian (Pujihastuti, 2010). Teknik pengambilan sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dengan cara, teknik pengampilan sampel dengan melakukan pertimbangan atau dengan kata lain kriteria tertentu. Maka kriteria yang akan diambil oleh penulis adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara. Menurut Sekaran dan Bougie (2017) dalam sebuah penelitian multivariate yang termasuk dalam analisis regresi linier berganda, maka ukuran sampel yang baik adalah dengan beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel tersebut. Maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner) dengan cara melakukan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di Jakarta Utara baik itu secara langsung, maupun secara tidak langsung. Kuesioner yang akan diberikan kepada responden adalah dengan berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan mengenai penggelapan pajak.



F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah sebuah bagian dari statistik yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan data dan juga bagaimana cara penyajian data agar lebih mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif akan memberikan sebuah keterangan mengenai suatu keadaan atau suatu fenomena (keadaan, gejala dan juga sebuah persoalan). Didalam statistik deskriptif terdapat beberapa ukuran diantaranya nilai rata – rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum (Ghozali, 2018:19). Rentang skala yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Priyatno, 2016:9) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RS = \frac{m-1}{m}$$

Keterangan :

Rs = Rentang skala penelitian

m = banyaknya kategori

Dimana dengan skor jawaban tertinggi adalah 5 dan terkecil adalah 1, sehingga dapat ditentukan rentang skalanya sebagai berikut :

$$RS = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

STS	TS	N	S	SS	
1,0	1,8	2,6	3,4	4,2	5,0

Dengan keterangan sebagai berikut :

1,0 – 1,8 = Sangat Tidak Setuju (STS)

1,8 – 2,6 = Tidak Setuju (TS)

2,6 – 3,4 = Netral (N)

3,4 – 4,2 = Setuju (S)



4,2 – 5,0 = Sangat Setuju (SS)



Hak Cipta dan Undang-Undang
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) 1932

2. Uji Kualitas Data

Sebelum memasuki uji kualitas data, maka akan dijelaskan mengenai skala yang akan digunakan dalam penelitian ini. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa butir pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengukur perilaku masing – masing individu dengan merespon 5 pilihan jawaban antara lain (Likert, 1932 dalam Ghozali 2018):

- 1 Sangat Tidak Setuju
- 2 Tidak Setuju
- 3 Netral
- 4 Setuju
- 5 Sangat Setuju

Peneliti melakukan uji kualitas data yaitu dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, uji validitas antara lain :

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, oleh karena itu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Maka, uji validitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan korelasi antar skor sebuah butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji signifikansi dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah n (jumlah sampel) dengan *alpha* sebesar 5%. Lalu, setelah itu kita akan melihat output dari *Cronbach Alpha* (α) dibagian kolom *Correlated Item – Total Correlation* (r hitung) dengan hasil perhitungan pada r tabel. Apabila r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel dan bernilai positif, maka suatu butir pertanyaan atau indikator tersebut dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator ataupun dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal atau reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut dikatakan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Selain itu, jawaban dari pernyataannya tidak boleh acak. Di dalam sebuah kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban individu mengenai pernyataan yang diberikan dijawab dengan konsisten dan tidak berubah (Ghozali, 2018:45). Selain itu, jawaban dari pernyataannya tidak boleh acak. Di dalam sebuah penelitian, pengukuran dengan menggunakan uji reliabilitas dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja atau biasa disebut juga *One Shot*, dimana SPSS memberikan fasilitasnya untuk mengukur hasil uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistik yaitu *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Nunnally, 1994 dalam Ghozali 2018).

3. Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan uji asumsi klasik, maka peneliti akan melakukan uji multikolinieritas, uji normalitas dan juga uji heteroskedastisitas.



a. Uji Multikolonieritas

Di dalam sebuah uji multikolonieritas ditunjukkan untuk menguji didalam sebuah model regresi apakah ditemukannya gejala korelasi dalam variabel independent Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, karena apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Yang dimaksud dengan ortogonal adalah dimana variabel independen yang mempunyai nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018:107). Untuk dapat mengetahui adanya gejala multikolonieritas atau tidak, maka dapat menggunakan :

- 1) Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai *VIF* ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolonieritas.
- 2) Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk dapat menguji apakah dalam model regresi, apakah variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal ataupun tidak, dengan menggunakan suatu uji *Kolmogorov Smirnov* (Ghozali, 2018:161). Maka yang harus dilakukan adalah dengan melihat nilai *Asymp Sig (2 tailed)*. Yang terdapat di dalam tabel output *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, lalu dapat membandingkannya dengan tabel kesalahan ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2018:166).

- 1) *Asymp Sig (2 tailed)* $> \alpha$ maka data terdistribusi secara normal.
- 2) *Asymp Sig (2 tailed)* $< \alpha$ maka data tidak terdistribusi secara normal.



c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. (Ghozali, 2018:137). Model regresi yang baik seharusnya homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika uji *scatterplot* antara *Zprediction* (ZPRED) dan nilai residual (SRESID) menyebar di bawah maupun diatas titik origin (angka 0) dan tidak mempunyai pola teratur (Ghozali, 2018:138).

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menentukan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2018:95).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Persepsi Penggelapan Pajak

X₁ = Keadilan Pajak

X₂ = Sistem Perpajakan

X₃ = Sanksi Perpajakan

e = error

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik Fisher (F)

Menurut (Ghozali,2018:98) pada uji F ini untuk menguji hipotesis β_1 , β_2 , β_3 secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_K = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots = \beta_K = 0$$

Jika nilai P-value pada kolom sig > dari nilai α ($\alpha = 5\%$). Maka terima H_0 dan tidak signifikan, jika nilai P-value pada kolom sig < dari nilai α ($\alpha = 5\%$), maka tolak H_0 yang berarti signifikan.

b) Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Kriteria uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika sig < 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti signifikan.
- 2) Jika sig > 0,05 maka H_0 diterima, yang berarti tidak signifikan.

Hipotesis statistik :

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_{a1}: \beta_1 < 0$$

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_{a2}: \beta_1 > 0$$

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$H_{a3}: \beta_1 > 0$$

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

koefisien determinasi (R^2) untuk dapat menilai seberapa jauh kemampuan variabel dependennya dalam menerangkan (Ghozali, 2018:97). Nilai suatu koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila R^2 menunjukkan nilai yang semakin kecil, yang berarti kemampuan sebuah variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.



Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. Lalu untuk data runtun waktu (*time series*) mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.